

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Oemar Seno, 1981, *Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 10, Rajawali Pers, Depok.
- Harahap, M Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Harahap, Muhammad Yahya, 2008, "*Ruang Lingkup Peninjauan kembali. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan kembali Perkara Perdata*". Sinar Grafika, Jakarta.
- Irsan, Prof Koesparmono dan Anggreany Haryani Putri, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Cetakan Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Salam, Moch Faisal, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, Dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 19, Rajawali Pers, Depok
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan 4, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

**Marius Gabriel Banurea, 2022**

***TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI***

52

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Tanya, Bernard L et al, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan

Permohonan Peninjauan kembali dalam Perkara Pidana

### **Karya Ilmiah**

Akbar, Muhammad Fatahillah, 2019, *Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Di Bidang Pengujian Undang-Undang Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Perubahan KUHAP*, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 3

**Marius Gabriel Banurea, 2022**

***TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

- Chakim, M.Lutfi, 2015, *Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, No 2.
- Fattah,Damanhuri, 2013, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol. 9 No.2
- Hasaziduhu,Moho, 2019, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,Keadilan,Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Vol. 13 No. 1  
[https://Doi.Org/10.46576/Wdw.V0i59.349](https://doi.org/10.46576/Wdw.V0i59.349)
- Kurniawati, Ika, Lusy Liany, 2019,*Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*,Jurnal Hukum Vol.10 No.1
- Mumbunan, Rendi Renaldi ,2018, *Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen,Vol. 7 No. 10
- Peremana, I Made Widi Ade , Dewi, A. A. S. L., dan Karma, N. M. S,2020, *Tinjauan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali pada Perkara Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol 1 No 2.
- Yuniagara , Riki, Eddy Purnama, dan M. Saleh Sjafei,2017,*Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali dalam Perkara Pidana*,Jurnal Ilmu Hukum,Vol 19 No 1

### Sumber Lainnya

<http://pnmeulaboh.go.id/content/artikel/page/1/201611021042431077109085581960b31427f.html>, diakses pada tanggal 7 februari 2022 pukul 15.30

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kasasi#:~:Text=Kasasi%20berasal%20dari%20bahasa%20Prancis%20yaitu%20cassation%20yang%20berarti%20memecah%20atau%20membatalkan>, diakses pada tanggal 13 januari 2022 pukul 14.05.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan>, diakses pada tanggal 22 februari 2022 pukul 15.52

<https://kabar24.bisnis.com/read/20141224/16/385727/terpidana-mati-4->

**Marius Gabriel Banurea, 2022**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

54

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

[bandarnarkobabataldieksekusi](#), diakses pada tanggal 18 februari 2022 pukul 17.03  
<https://Ngobrolinhukum.Wordpress.Com/Memahami-Kepastian-Dalamhukum/> diakses  
pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 08.28

<https://Sonny-Tobelo.Com/2010/10/Teori-Tujuanhukum-Gustav-Radbruch-Dan> , diakses pada  
tanggal 19 desember 2021 pukul 14.20

[https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/07/n2289n-  
mahfudmdputusanmk-berbahaya](https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/03/07/n2289n-mahfudmdputusanmk-berbahaya), diakses pada tanggal 3 februari 2022 pukul 10.15